

ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A VAN DIJK PIDATO KETUA DPR RI PADA SIDANG TAHUNAN MPR DAN SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD TAHUN 2024

Rahayu Setiowati¹, Ria Nur Mega², Muhsinin³, Agung Setiagiri⁴

Email: rahayu.setiowati@students.paramadina.ac.id¹, ria.mega@students.paramadina.ac.id², muhsinin@students.paramadina.ac.id³, agung.setiagiri@students.paramadina.ac.id⁴

Magister Universitas Paramadina

Abstrak: Studi ini mengkaji Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani yang disampaikan pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024. Studi ini bertujuan untuk menelaah struktur teks, kognisi sosial, dan dimensi sosial dalam pidato Puan Maharani. Studi ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Studi ini menyimpulkan pertama, Pada struktur teks, Ketua DPR RI Puan Maharani menggunakan kosakata positif, metafora inklusif, dan polarisasi untuk menguatkan citra lembaga DPR. Kedua, pada dimensi kognisi sosial pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dipengaruhi oleh ideologi pro-status quo, dengan representasi kognitif yang menguntungkan kelompok dominan. Ketiga, pada dimensi konteks sosial, pidato Ketua DPR RI Puan Maharani bertujuan untuk mempertahankan legitimasi DPR dalam struktur kekuasaan, terutama dalam situasi politik atau ekonomi yang krusial.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Pidato, Analisis Teks, Kognisi Sosial, Konteks Sosial.

Abstract: This study examines the speech of the Speaker of the Indonesian House of Representatives (DPR), Puan Maharani, delivered at the annual session of the People's Consultative Assembly (MPR) and the Joint Session of the DPR and the Regional Representative Council (DPD) in 2024. The study analyses Puan Maharani's speech text structure, social cognition, and social dimensions. This qualitative study uses the critical discourse analysis approach Teun A. van Dijk developed. The study concludes, first, in terms of text structure, the Speaker of the DPR, Puan Maharani, uses positive vocabulary, inclusive metaphors, and polarization to strengthen the image of the DPR institution. Second, regarding social cognition, the speech of the Speaker of the DPR, Puan Maharani, is influenced by a pro-status quo ideology, with cognitive representations that benefit the dominant group. Third, in terms of social context, the speech of the Speaker of the DPR, Puan Maharani, aims to maintain the legitimacy of the DPR within the power structure, especially in crucial political or economic situations.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Speech, Text Analysis, Social Cognition, Social Context.

PENDAHULUAN

Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada sidang tahunan MPR, DPR, DPD 2024, diapresiasi oleh banyak kalangan, bahkan memperoleh standing applause dari para peserta sidang tahunan tersebut. Pada pidato tersebut, Puan mengkritik pelaksanaan Pemilu bahkan mempertanyakan pemilu 2024 sudah berkeadilan, menyuarakan kesetaraan gender, mengajak perempuan untuk bangkit dan mendorong perempuan untuk tangguh. Apa sebenarnya yang hendak diungkap Puan dalam pidato itu, mengapa Puan menggunakan konsep-konsep tertentu ketika mengkritik pelaksanaan pemilu, mengapa pula ia mendorong adanya check and balance dalam trias politica. Memahami makna bahasa yang digunakan Puan untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan informasi dalam pidato tersebut tentu tidak mudah. Karena pesan, gagasan, dan informasi yang disampaikan melalui pilihan kosakata, frasa, dan metafora memiliki makna yang ingin dikonstruksi, bahkan merupakan cerminan ideologi, kekuasaan, dan identitas penuturnya.

Untuk memahami makna pesan, gagasan, dan informasi yang di sampaikan Puan tersebut perlu dilakukan studi dengan pendekatan tertentu, yakni dengan pendekatan analisis wacana. Dalam analisis wacana, bahasa bukan semata-mata sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan informasi penuturnya. Lebih dari itu bahasa berfungsi

sebagai: pembentuk makna, cerminan ideologi dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat, pembentuk identitas individu dan kelompok, ekspresi identitas sosial, budaya, dan politik. Bahkan, bahasa dipandang sebagai media komunikasi untuk: mempengaruhi dan meyakinkan audiens, memelihara struktur sosial yang ada serta dalam mendorong perubahan sosial, memperkuat norma-norma sosial atau untuk menantang dan mengubahnya, memberikan konteks pada komunikasi (Mulyana, 2005).

Ada beberapa studi tentang Pidato Puan Maharani, di antaranya ditulis oleh Adrias, Syihabuddin, Vismaia S. Damaianti, Andoyo Sastomiharjo (2020). Dengan menggunakan pendekatan retorika studi tersebut mendeskripsikan gaya bahasa, teknik pelafalan dan ekspresi Puan Maharani dalam berpidato. Studi ini menyimpulkan nada pidato Puan Maharani cenderung sederhana, menggunakan gaya bahasa klimaks dan retorik. Teknik pelafalan cenderung datar. Ekspresi bahasa yang digunakan cenderung samar, dalam pengertian makna kalimat yang ingin disampaikan tidak sama dengan bahasa yang digunakan.

Studi lain tentang Puan Maharani dilakukan untuk mendeskripsikan framing berita yang dilakukan media online suara.com dan kumparan tentang Puan Maharani yang terbata-bata saat menyampaikan pidato dalam Bahasa Inggris pada Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol (Lintang Cahya Rahmat Kinasih, Ayla Daniyah Ramadhini, Thea Kirana Ismi' Aida, Gayatri Puspita Sari, Roro Retno Wulan, 2023). Sebagai studi kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Studi ini menyimpulkan bahwa media online suara.com menghasilkan pemberitaan yang menonjolkan Puan Maharani sebagai pemimpin dianggap memiliki kekurangan karena kemampuan berbahasa Inggris yang kurang baik dan tidak layak memimpin sidang dengan membawa nama Indonesia. Sementara media online kumparan menghasilkan pemberitaan yang menonjolkan bahwa sikap nervous hingga terbata-bata ketika berpidato dianggap wajar karena perlu jam terbang.

Selain studi di atas, studi tentang fungsi bahasa dalam wacana lisan pidato Puan Maharani pada acara hari Bung Karno ditulis Nadia Azkal Uyun, Khusnul Khotimah (2023). Studi ini bertujuan untuk menganalisis fungsi bahasa yang digunakan dalam pidato Puan Maharani saat hari Bung Karno yang diunggah tiga bulan lalu oleh kanal you tube liputan6. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana model fungsi bahasa M.A.K Halliday. Studi ini menunjukkan bahwa fungsi bahasa yang dominan digunakan Puan Maharani dalam pidato tersebut adalah fungsi bahasa representasional dibandingkan fungsi-fungsi yang lain. Penutur banyak menyampaikan fakta melalui rasa hormat kepada para petinggi negara dan partai politik. Analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran bahasa dalam wacana lisan dalam konteks peringatan sejarah dan budaya.

Selanjutnya, studi analisis framing pemberitaan Puan Maharani terhadap isu Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja Di Portal Berita Kompas.Com dan Detik.Com edisi Oktober 2020 ditulis Imelda Dwi Putri Nainggolan, Putri Alifiah Widyawan, Najhan Akbar, Lukas Febrian K, Endang Sholihatin. Studi ini dilakukan untuk mengetahui framing pemberitaan Puan Maharani terhadap isu peraturan perundang-undangan Cipta Kerja pada portal berita Kompas.com dan Detik.com pada edisi 2020. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data secara observasi dan analisis framing model Robert N. Entman. Studi ini menyimpulkan bahwa pilihan kosakata yang digunakan dalam penyampaian berita Kompas.com dan Detik.com berbeda. Perbedaan ini dapat ditemui pada pilihan kosakata dalam menggambarkan suatu berita disampaikan. Pemberitaan pada Kompas.com cenderung menggunakan kata ilmiah (kata kajian), kata baku dan penyampaian kesantunan bahasa yang lebih baik jika dibandingkan dengan Detik.com. Penyampaian berita portal berita Detik.com menggunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami. Kalimat pada media berita Kompas.com cenderung menggunakan kalimat majemuk dengan informasi yang lengkap.

Studi-studi tentang Puan Maharani di atas, menurut penulis masih menitikberatkan pada penggunaan aspek bahasa dan belum menelaah secara kritis apa isi pesan dan mengapa

pesan itu perlu disampaikan Puan Maharani, dengan kata lain, studi-studi sebelumnya belum menelaah pemikiran dan gagasan Puan Maharani yang ada pada teks pidato secara utuh, serta konteks sosial yang melatarbelakanginya. Karena itu menurut penulis perlu dilakukan studi tentang pemikiran dan gagasan serta konteks sosial dari pemikiran dan gagasan tersebut. Pendekatan studi yang dapat digunakan dalam studi demikian adalah analisis wacana kritis.

Analisis wacana kritis menurut Eriyanto (2009:7) berbeda dengan studi bahasa dalam perspektif linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Menurut Titscher (2000: 147) analisis wacana kritis mengkonseptualisasikan bahasa sebagai bentuk praktik sosial, dan mencoba membuat pembaca sadar akan pengaruh timbal balik antara bahasa dan struktur sosial yang biasanya tidak disadari.

Berdasarkan pertimbangan di atas, studi menelaah pidato kenegaraan ketua DPR RI tentang demokrasi, kedaulatan rakyat, dan etika politik pasca-Pemilu 2024 yang disampaikan pada Sidang bersama DPR dan DPD RI. Studi ini menyatakan bahwa isi dari pidato tersebut memiliki dampak terhadap pemahaman publik tentang demokrasi, kedaulatan rakyat, dan etika politik di Indonesia.

Karena itu, studi ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan berikut: apa teks pidato yang disampaikan oleh Ketua DPR RI? Bagaimana teks merepresentasikan pengetahuan, keyakinan, ideologi Ketua DPR RI? Bagaimana konteks sosial tercermin dalam teks pidato Ketua DPR RI? Berdasarkan rumusan pertanyaan tersebut, studi dilakukan untuk menelaah struktur teks pidato, kognisi sosial teks sebagai representasi pengetahuan, keyakinan dan ideologi, dan konteks sosial yang tercermin teks pidato ketua DPR RI. Tujuan studi tersebut diperoleh dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Teun A van Dijk.

Menurut Darma (2009:86) dari sekian banyak analisis wacana kritis yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli, model Dijk adalah model yang paling banyak dipakai. Model tersebut memiliki keunggulan karena lebih praktis dalam penerapannya. Pendekatan analisis wacana kritis model Dijk disebut kognisi sosial. Pendekatan ini beranggapan bahwa kognisi sosial merupakan elemen penting dalam proses produksi sebuah wacana di masyarakat. Sebuah wacana yang muncul memiliki kecenderungan tertentu karena kognisi atau kesadaran mental yang ada dalam diri penulis, bahkan kesadaran masyarakat tempat wacana tersebut muncul.

Menurut Eriyanto (2009:260), Dijk memandang analisis wacana tidak dibatasi hanya pada struktur teks karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan dan menandakan sejumlah makna, pendapat, dan ideologi. Untuk membongkar bagaimana makna tersembunyi dari teks, dibutuhkan suatu analisis kognisi dan konteks sosial. Wacana digambarkannya mempunyai tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Ketiganya digabungkan menjadi kesatuan analisis (Darma, 2009: 88). Pendekatan kognisi sosial dalam analisis wacana kritis (AWK) model Teun A. van Dijk menelaah hubungan antara teks, konteks sosial, dan proses kognitif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana wacana berfungsi dalam menciptakan, mereproduksi, dan mempertahankan kekuasaan, dominasi, serta ketidakadilan sosial.

Van Dijk mengusulkan tiga dimensi utama yang saling berkaitan dalam menganalisis wacana kritis, pertama, teks atau struktur wacana, menganalisis elemen linguistik dalam teks, seperti pilihan kata, struktur kalimat, gaya bahasa, metafora, dan argumen yang digunakan untuk mendukung atau melawan ide tertentu; kedua, kognisi sosial, mengkaji proses mental atau representasi kognitif individu atau kelompok yang memengaruhi produksi dan pemahaman wacana. Kognisi ini mencakup pengetahuan, keyakinan, ideologi, dan memori kolektif yang terkait dengan konteks sosial tertentu; ketiga, konteks sosial, menelaah struktur sosial, kekuasaan, dan praktik budaya yang melatarbelakangi wacana. Hal ini melibatkan analisis bagaimana wacana merefleksikan atau memperkuat ketimpangan sosial.

Kognisi sosial menurut van Dijk adalah jembatan antara teks dan konteks sosial. Proses kognisi sosial melibatkan: pertama, model mental, representasi individu terhadap peristiwa

atau situasi tertentu yang membentuk cara mereka memahami teks atau menghasilkan wacana; kedua, skema sosial, pengetahuan bersama dalam masyarakat yang mencakup norma, nilai, atau stereotip, yang memengaruhi bagaimana teks diproduksi atau dipahami; ketiga, ideologi, sistem keyakinan kelompok yang sering tersembunyi dalam wacana tetapi dapat dianalisis melalui pilihan bahasa dan struktur wacana.

Pendekatan analisis wacana kritis model Dijk memiliki beberapa prinsip dasar, yakni pertama, wacana adalah alat kekuasaan, wacana digunakan untuk menciptakan atau mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat; kedua, kognisi terhubung dengan ideologi, kognisi sosial sering dipengaruhi oleh ideologi yang menentukan bagaimana kelompok sosial melihat dunia. Ketiga, teks mencerminkan konteks sosial, karena itu analisis teks harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, seperti hubungan kekuasaan, dominasi, dan perjuangan.

Analisis wacana kritis dengan pendekatan kognisi sosial dilakukan dengan beberapa langkah berikut: pertama, analisis teks, yakni melakukan identifikasi beberapa elemen bahasa seperti kosakata, metafora, struktur kalimat, dan argumen yang relevan yang ada di dalam teks yang dianalisis; kedua, analisis kognisi sosial, yakni menelaah bagaimana teks merepresentasikan pengetahuan, opini dan sikap, atau ideologi tertentu. Analisis wacana dalam langkah kedua ini juga menelaah bagaimana stereotip atau bias muncul dalam wacana; ketiga, analisis konteks sosial, yakni menelaah bagaimana struktur sosial atau hubungan kekuasaan tertentu tercermin dalam teks, juga mengkaji dampak sosial dari wacana terhadap kelompok tertentu.

METODE PENELITIAN

Data utama studi ini bersumber dari teks pidato Ketua DPR RI Puan Maharani yang disampaikan pada sidang bersama MPR, DPR, dan DPD RI tanggal 16 Agustus 2024. Teks pidato tersebut dimasukkan dalam tiga dimensi studi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada struktur teks, data dikategorikan dalam tiga bagian utama, yaitu struktur makro (topik), superstruktur (skematik), dan struktur mikro (semantik, leksikon, sintaksis, serta gaya dan retorika). Pada dimensi kognisi sosial, data dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu pengetahuan, opini dan sikap, serta ideologi. Pada konteks sosial, pembahasan dikaitkan dengan wacana yang berkembang atau latar sosial tempat pidato itu disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah tahapan dalam menganalisis wacana kritis model Teun A van Dijk yang dikenal pendekatan kognisi sosial: pertama, analisis struktur teks, melakukan analisis pada struktur makro dan struktur mikro, yakni melakukan analisis pada semantik, leksikon, sintaksis, gaya dan retorika; kedua, analisis kognisi sosial, menelaah bagaimana teks merepresentasikan pengetahuan, opini dan sikap, serta ideologi tertentu. Menelaah bagaimana stereotip atau bias muncul dalam wacana; ketiga, analisis konteks sosial, menelaah bagaimana struktur sosial atau hubungan kekuasaan tertentu tercermin dalam teks. Mengkaji dampak sosial dari wacana terhadap kelompok tertentu.

1. Analisis Struktur Teks

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menelaah unsur-unsur bahasa dalam pidato, seperti kosakata, metafora, struktur kalimat, dan argumen yang digunakan. Pertama, pilihan kosakata. Ketua DPR menggunakan kata-kata seperti persatuan, stabilitas, dan kepentingan rakyat untuk menciptakan kesan bahwa fokus utama adalah menjaga integrasi bangsa. Kedua, metafora, dalam pidatonya Puan Maharani menyebutkan “DPR sebagai rumah besar demokrasi” untuk memberikan kesan inklusivitas dan keterbukaan; Ketiga, polarisasi. Pidato dapat menciptakan dikotomi antara “kita” (anggota DPR yang pro-rakyat) dan “mereka” (pihak yang dianggap mengganggu stabilitas).

Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa kosakata, metafora, polarisasi yang dipilih Ketua DPR cenderung memperkuat citra positif DPR sebagai lembaga pro-rakyat, sementara dikotomi memperkuat legitimasi tindakan politik tertentu dengan

menggambarkan pihak lain sebagai ancaman.

2. Analisis Struktur Teks

Pada bagian ini analisis dibagi menjadi dua bagian utama, pertama struktur makro dan kedua adalah struktur mikro. Pada struktur makro, penulis menelaah tema-tema atau pokok-pokok pikiran yang ada dalam pidato Ketua DPR RI, sementara pada struktur mikro, telaah dilakukan terhadap sisi bahasa yang digunakan, mulai dari semantik, leksikon, sintaksis, gaya, dan retorika.

3. Struktur Makro

Tema utama pidato ketua DPR RI pada sidang bersama MPR, DPR, dan DPD pada 16 Agustus 2024 adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara pokok-pokok pikiran yang ada dalam pidato Puan Maharani pada sidang tahun MPR 2024 adalah: (1) Ucapan selamat atas terpilihnya Prabowo-Gibran; (2) Kritik terhadap sikap melakukan segala cara untuk menang Pemilu 2024; (3) Apakah Pemilu 2024 sudah berkeadilan; (4) Peserta pemilu harus mematuhi etika politik; (5) Pemilu seharusnya memenangkan rakyat; 6. Pentingnya check and balances dalam trias politica; (7) Indonesia bukan untuk satu orang; (8) Bahaya kekuasaan tanpa visi; (9) Rakyat harus terlibat dalam kontrol sosial; (10) Mendesak negara menjamin hak demokrasi setiap warga; (11) Kritik kinerja lembaga dalam fenomena no viral, no justice; (12) Pemerintah tak hanya fokus "melanjutkan" dan "perubahan" (13) Memberi ruang pada perempuan dalam pembangunan; (14) Urgensi mengakui kodrat dalam kesetaraan; (15) Negara untuk memperhatikan kualitas SDM; (16) Pemerintah untuk cermat dalam membangun IKN; (17) Pentingnya kerja sama lintas generasi; (18) Pentingnya menjaga persatuan; (19) Ajakan agar semua orang ikut mengisi kemerdekaan Indonesia.

4. Superstruktur

Teks pidato Ketua DPR RI yang disampaikan pada Sidang Bersama disusun secara sistematis. Susunan tersebut membuat gagasan yang ditawarkannya terlihat menonjol dan kelemahannya tidak tampak. Setiap pidato selalu terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup.

Pada bagian isi, Puan Maharani menyampaikan evaluasi demokrasi, kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, dan pandangan etika politik dan keseimbangan kekuasaan, perlunya memberi ruang kepada perempuan dalam pembangunan, perlu pengakuan kodrat dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, perlunya menjaga persatuan, dan partisipasi semua orang dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Pada bagian penutup, Puan Maharani menegaskan perlunya menjaga demokrasi yang berkeadilan dan menghormati hak semua warga negara.

5. Struktur Mikro

Pada struktur mikro, analisis ditekankan pada aspek bahasa yang digunakan dalam pidato, yakni analisis semantik, leksikon, sintaksis, gaya bahasa, dan retorika.

6. Semantik

Analisis semantik adalah kajian tentang makna kata, frasa, dan kalimat dalam suatu bahasa. Ketika diterapkan dalam analisis wacana kritis, semantik digunakan untuk mengungkap makna tersirat dan makna sosial yang terkandung dalam sebuah teks. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk, mempertahankan, atau menantang kekuasaan sosial. Pada teks pidato Puan Maharani, salah satu kalimat yang dianalisis secara semantik pada teks pidato tersebut adalah

"Pelaksanaan Pemilu, bagi rakyat adalah pesta demokrasi: rakyat dianggap menjadi penting, rakyat diundang oleh setiap calon, ada yang menyediakan hiburan, ada yang menyediakan konsumsi, ada yang menyediakan oleh-oleh. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi"

Kata, "pesta demokrasi" pada paragraf di atas memiliki konotasi positif, yang menggambarkan Pemilu sebagai sebuah perayaan yang meriah dan menyenangkan. Pemilu dipandang sebagai momen di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin dan merasa dihargai. Namun ungkapan tersebut dapat mengaburkan sisi serius dari Pemilu sebagai proses politik yang melibatkan keputusan-keputusan penting bagi negara. Sementara

kalimat "Rakyat dianggap menjadi penting" menegaskan bahwa rakyat adalah subjek utama dalam Pemilu. Setiap calon mengakui pentingnya suara rakyat dalam menentukan pemimpin. Kalimat ini dapat menjadi alat kampanye untuk menarik simpati pemilih.

Ungkapan "Rakyat diundang oleh setiap calon": memberikan kesan bahwa setiap calon sangat menghargai partisipasi rakyat. Calon-calon berusaha untuk mendekati dan melibatkan rakyat dalam kampanye mereka. Kalimat ini dapat menyederhanakan kompleksitas hubungan antara calon dan rakyat, yang seringkali melibatkan kepentingan politik yang lebih luas.

Kalimat "Ada yang menyediakan hiburan, ada yang menyediakan konsumsi, ada yang menyediakan oleh-oleh" menggambarkan Pemilu sebagai sebuah acara hiburan yang menawarkan berbagai macam fasilitas bagi rakyat. Calon-calon berusaha untuk menarik perhatian rakyat dengan memberikan berbagai macam insentif. Kalimat ini dapat mengarah pada pandangan bahwa Pemilu lebih merupakan ajang persaingan untuk mendapatkan suara daripada sebuah proses politik yang mendalam.

"Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi": Kalimat ini menegaskan bahwa rakyat merasa senang dan puas dengan pelaksanaan Pemilu. Pemilu dipandang sebagai sebuah momen yang menyenangkan bagi rakyat. Kalimat ini dapat menyembunyikan potensi konflik dan perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, paragraf tersebut menyajikan pandangan yang sangat positif dan idealis tentang Pemilu. Tetapi konsep "pesta demokrasi" menyederhanakan kompleksitas proses politik dan menekankan aspek hiburan dan kesenangan. Meskipun pandangan ini dapat memotivasi partisipasi rakyat, namun perlu diingat bahwa Pemilu juga merupakan proses yang serius dan melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda-beda.

Paragraf ini cenderung menyederhanakan kompleksitas Pemilu. Paragraf ini lebih fokus pada aspek positif Pemilu, seperti kesenangan dan partisipasi rakyat, tanpa membahas tantangan dan masalah yang mungkin timbul. Penggunaan bahasa yang positif dan menarik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting.

7. Analisis leksikon

Analisis leksikon merupakan salah satu bagian dari struktur mikro dalam analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk. Leksikon sendiri mengacu pada keseluruhan kosakata atau perbendaharaan kata yang digunakan dalam suatu teks. Dalam konteks analisis wacana kritis, leksikon tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan kata, tetapi juga sebagai alat yang digunakan untuk membangun makna, membentuk opini, dan merepresentasikan ideologi tertentu.

Pada elemen leksikon, penulis memilih kosakata yang positif dalam menggambarkan tindakan atau konsep yang ditawarkan dan memilih kosakata yang negatif dalam menggambarkan keburukan tindakan atau konsep kelompok luar. Teks pidato yang menunjukkan hal ini adalah sebagai berikut.

"Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih. Akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut."

Teks di atas membahas tentang kualitas pemilu dengan fokus pada kebebasan memilih rakyat. Pemilu yang berkualitas: Kata "kualitas" memiliki konotasi positif, mengisyaratkan suatu standar yang tinggi dan memenuhi harapan. Partisipasi rakyat: Kata "partisipasi" juga berkonotasi positif, menunjukkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses demokrasi. Kebebasan rakyat untuk memilih: Kata "kebebasan" adalah kata kunci utama dalam teks ini. Konotasinya sangat kuat, mengacu pada hak dasar manusia untuk menentukan pilihan tanpa adanya tekanan atau intervensi. Bebas, jujur, adil: Kata-kata ini membentuk rangkaian yang ideal tentang bagaimana sebuah pemilu seharusnya berlangsung. Masing-masing kata memiliki konotasi positif yang saling memperkuat. Tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, tanpa rasa takut: Kata-kata ini berfungsi untuk menegaskan pentingnya kebebasan dalam memilih. Konotasinya negatif, menggambarkan situasi yang tidak ideal jika elemen-elemen tersebut

hadir dalam proses pemilu.

Dari analisis leksikon di atas, dapat disimpulkan bahwa teks ini menekankan pentingnya kebebasan dalam proses pemilu. Penulis ingin menyampaikan bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh jumlah partisipasi, tetapi juga oleh sejauh mana rakyat dapat memilih secara bebas dari segala bentuk tekanan atau intimidasi.

8. Sintaksis

Sintaksis dalam konteks analisis wacana kritis merujuk pada susunan dan struktur kalimat dalam suatu teks. Ini bukan hanya sekadar tata bahasa, tetapi lebih pada bagaimana susunan kalimat-kalimat itu digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu, membangun argumen, atau bahkan memanipulasi pembaca. Dalam teks pidato Puan Maharani, analisis sintaksis dilakukan pada teks berikut.

"Menang kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang. Siap bertanding, siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya."

Teks di atas membahas tentang etika politik dalam konteks pemilu. Jika struktur kalimat dan fungsinya dianalisis secara sintaksis dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kalimat "Menang kalah selalu ada dalam pemilu." Jika ditelaah secara sintaksis maka dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat deklaratif (pernyataan), strukturnya terdiri dari subjek (menang kalah), predikat (selalu ada) dan keterangan tempat (dalam pemilu) kalimat tersebut berfungsi untuk menyampaikan fakta umum tentang pemilu.

Kalimat "Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang." Merupakan kalimat deklaratif (pernyataan). Strukturnya terdiri dari subjek (kita), predikat (dituntut), keterangan (untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang). Kalimat ini berfungsi untuk menekankan pentingnya etika politik dalam menghadapi hasil pemilu.

Kalimat "Siap bertanding, siap juga untuk bersanding." Merupakan kalimat beberapa frasa (tidak lengkap). Kalimat ini berfungsi untuk memperkuat ide tentang kesiapan menghadapi segala hasil pemilu, baik menang maupun kalah.

Kalimat "Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya." Merupakan kalimat deklaratif (pernyataan). Strukturnya terdiri dari subjek (etika politik yang sama), predikat (menuntut), objek (pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya). Kalimat ini berfungsi untuk menjelaskan implikasi dari etika politik yang baik, yaitu penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Analisis sintaksis di atas menunjukkan bahwa teks ini menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan berfokus pada tindakan. Struktur kalimat yang sederhana dan penggunaan kata-kata yang tepat sasaran membuat pesan yang ingin disampaikan mudah dipahami oleh pembaca. Teks ini secara efektif mengkomunikasikan pentingnya etika politik dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

9. Gaya dan Retorika

Gaya dan retorika merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam analisis wacana kritis. Keduanya digunakan untuk mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan, membentuk opini, dan mempengaruhi pembaca atau pendengar.

Gaya bahasa mengacu pada ciri khas atau karakteristik individu dalam menggunakan bahasa. Ini mencakup pilihan kata, struktur kalimat, penggunaan figuratif seperti metafora atau simile, serta nada yang digunakan. Gaya bahasa dapat mencerminkan kepribadian, latar belakang sosial, atau tujuan komunikatif seseorang.

Retorika adalah seni menggunakan bahasa untuk membujuk atau meyakinkan orang lain. Retorika melibatkan pemilihan kata yang tepat, struktur argumen yang kuat, dan penggunaan berbagai teknik persuasi. Tujuan utama retorika adalah untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu, seperti mengubah pikiran orang, memotivasi tindakan, atau membangun konsensus.

"Pembangunan yang inklusif, juga memberikan ruang bagi perempuan dalam

pembangunan. Keikutsertaan perempuan bukanlah sebagai bentuk afirmatif, akan tetapi sebagai bentuk kesadaran kita bersama bahwa peran laki-laki dan perempuan setara kedudukannya dalam membangun bangsa dan negara."

a. Gaya Bahasa

Formal: Penggunaan bahasa sangat formal, mencerminkan bahasan yang serius dan cenderung akademis atau kebijakan. Khas Diskursif: Gaya bahasa cenderung diskursif, yaitu berorientasi pada pembahasan konsep dan ide secara sistematis. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata seperti "inklusif", "afirmatif", dan "kedudukan". Objektif: Paragraf berusaha menyajikan pandangan yang objektif dan rasional, tanpa terlalu banyak menggunakan kata-kata yang bersifat emosional atau persuasif.

b. Retorika:

Persuasi halus: Meskipun berusaha tampil objektif, paragraf ini secara halus berusaha meyakinkan pembaca tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Argumen berbasis nilai: Argumen didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan. Konsep "inklusivitas" dan "kesadaran bersama" mengundang pembaca untuk berempati dan setuju. Kontras: Penggunaan kata "bukan sebagai bentuk afirmatif, akan tetapi" menciptakan kontras yang kuat. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa keterlibatan perempuan bukan sekadar kebijakan formal, tetapi merupakan sebuah keyakinan mendasar. Generalisasi: Kata "kita bersama" menciptakan kesan bahwa pandangan ini adalah pandangan yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum paragraf ini menggunakan gaya bahasa yang formal dan objektif untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Retorika yang digunakan bersifat persuasif namun halus, dengan fokus pada nilai-nilai universal dan penolakan terhadap diskriminasi. Secara keseluruhan, paragraf ini berhasil menyampaikan pesan yang kuat dan relevan dengan isu-isu sosial saat ini.

10. Analisis Kognisi Sosial

Tahap ini mengkaji bagaimana pemahaman, keyakinan, dan ideologi yang mendasari pidato politik tersebut. Pertama, pemahaman (model mental), ketua DPR mungkin memiliki pandangan bahwa masyarakat menginginkan stabilitas dan pembangunan ekonomi, sehingga pidato menekankan pentingnya kerja sama lintas partai untuk mencapai tujuan tersebut; Kedua, keyakinan (skema sosial), pidato dapat mencerminkan stereotip tertentu, misalnya bahwa oposisi dianggap "tidak konstruktif" atau "memecah belah," yang secara implisit mempengaruhi audiens untuk mendukung koalisi pemerintah; Ketiga, Ideologi, ideologi politik yang mendasari pidato dapat dinilai pro-status quo, yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu dalam struktur politik. Berdasarkan hasil telaah di atas dapat dikatakan, pidato dirancang untuk membentuk opini publik agar mendukung kebijakan DPR yang dipengaruhi oleh ideologi kelompok dominan.

Pidato ini mencerminkan persepsi Puan Maharani sebagai Ketua DPR, yang bertugas memastikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara dan mendorong etika politik. Pandangan ini diwarnai oleh: Peran DPR, Sebagai pengawas pelaksanaan demokrasi. Nilai-nilai Nasionalis, Mengacu pada Pancasila dan demokrasi kerakyatan yang berlandaskan permusyawaratan. Pengalaman Pemilu, Kritik terhadap aspek-aspek pragmatisme dalam Pemilu, seperti cara-cara menarik simpati rakyat melalui konsumsi dan hiburan, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap dinamika politik praktis.

11. Analisis Konteks Sosial

Di tahap ini, kita menghubungkan teks dan kognisi sosial dengan kondisi sosial dan politik yang melatarbelakangi pidato. Pertama, konteks politik, Pidato disampaikan setelah pemilu, karena itu, pidato tersebut fokus pada "persatuan nasional" hal tersebut dapat dilihat sebagai strategi untuk menarik simpati publik dan menonjolkan peran DPR sebagai simbol stabilitas; Kedua, Konteks Ekonomi, Jika situasi ekonomi sedang sulit, pidato mungkin berisi narasi tentang "kerja keras" DPR dalam menyusun anggaran demi mengatasi tantangan ekonomi rakyat; ketiga, relasi kekuasaan, pidato memperlihatkan bagaimana Ketua DPR menggunakan platformnya untuk menegaskan legitimasi dan pengaruh politik lembaganya,

sekaligus menekan kritik terhadap kebijakan tertentu. Pidato digunakan untuk mereproduksi kekuasaan politik DPR dalam situasi tertentu, misalnya dengan menonjolkan keberhasilan mereka atau menyudutkan oposisi yang dianggap mengancam stabilitas.

Pidato ini disampaikan pada Sidang Tahunan, sebuah forum strategis yang mempertemukan lembaga-lembaga negara. Konteks sosial yang memengaruhi wacana ini meliputi: pertama, situasi pasca-Pemilu 2024, Pemilu baru saja selesai, sehingga pidato ini berfungsi sebagai refleksi sekaligus arahan untuk menjaga stabilitas politik. Kedua, perubahan kepemimpinan nasional, ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menunjukkan pengakuan resmi terhadap hasil Pemilu. Ketiga, kritik terhadap demokrasi wacana, menyinggung media sosial sebagai alat manipulasi persepsi menunjukkan kekhawatiran terhadap pengaruh negatif teknologi terhadap demokrasi.

KESIMPULAN

Melalui AWK Teun A. van Dijk, pidato ketua DPR RI Puan Maharani dapat dipahami sebagai upaya untuk: Menegaskan posisi DPR sebagai penjaga demokrasi yang berkualitas. Membangun narasi persatuan dan etika politik di tengah tantangan demokrasi modern. Mengingatkan semua pihak untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam praktik demokrasi. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana struktur pidato, latar belakang ideologi, dan konteks sosial membentuk makna wacana yang disampaikan.

Pidato ini mencerminkan persepsi Puan Maharani sebagai Ketua DPR, yang bertugas memastikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara dan mendorong etika politik. Pandangan ini diwarnai oleh: Peran DPR, Sebagai pengawas pelaksanaan demokrasi. Nilai-nilai Nasionalis, Mengacu pada Pancasila dan demokrasi kerakyatan yang berlandaskan permusyawaratan. Pengalaman Pemilu, Kritik terhadap aspek-aspek pragmatisme dalam Pemilu, seperti cara-cara menarik simpati rakyat melalui konsumsi dan hiburan, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap dinamika politik praktis.

Dari analisis wacana kritis ini, dapat disimpulkan bahwa pidato politik Ketua DPR: pada dimensi struktur teks, pidato ketua DPR RI memanfaatkan kosakata positif, metafora inklusif, dan polarisasi untuk menguatkan citra lembaga DPR. Pada dimensi kognisi sosial, dipengaruhi oleh ideologi pro-status quo, dengan representasi kognitif yang menguntungkan kelompok dominan. Pada dimensi konteks sosial, bertujuan untuk mempertahankan legitimasi DPR dalam struktur kekuasaan, terutama dalam situasi politik atau ekonomi yang krusial.

Saran

Studi mengenai pidato ketua DPR RI masih perlu diteliti lebih mendalam melalui berbagai teori lain yang membahas dari sudut pandang yang berbeda. Karena pidato ketua DPR sejatinya merupakan sebuah wacana yang memiliki akses yang besar untuk disebarluaskan kepada masyarakat sehingga memiliki pengaruh yang besar. Ada beragam wacana dalam pidato ketua DPR RI yang dapat dianalisis wacana kesetaraan gender, media, nasionalisme, rasisme, dan wacana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrias, Syihabuddin, Vismaia S. Damaianti, Andoyo Sastomiharjo, 2020. "Pidato Puan Maharani Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Dalam Kajian Retorika", *Jurnal Gramatika: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 6 No. 1. April 2020 (51-64).
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Dijk, Teun A. van. 1982. "Opinions and Attitudes in Discourse Comprehension", dalam J.F. Le Ny dan W. Kintsch, (Eds.), *Language and comprehension*. Amsterdam: North Holland (hlm. 35-51), (Online), diakses 24 Mei 2012.
- Dijk, Teun A. van. 1993. *Principles of Critical Discourse Analysis*. *Discourse & Society*. SAGE (London. Newbury Park and New Delhi), 4 (2): 249-283. (Online), (<http://www.discourse.org>) diakses 15 Maret 2012.
- Dijk, Teun A. van. 1995. *Discourse semantics and ideology*. *Discourse & Society*. SAGE (London. Thousands,

- Oaks, CA and New Delhi), 6 (2): 243-289. (Online), (<http://www.discourse.org>), diakses 1 September 2012.
- Dijk, Teun A. van. 1995a. "What is Political Discourse Analysis". Makalah disajikan pada Congress Political Linguistics. Antwerp, 7-9 Desember 1995. Dalam Jan Blommaert dan Chris Bulcaen
- Dijk, Teun A. van. 2003. "Knowledge in parliamentary debates", dalam Paul Chilton (Ed), *Journal of Language and Politics* (hlm. 93-129). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. (Online), (<http://www.discourse.org>), diakses 24 Mei 2012.
- Dijk, Teun A. van. 2005. "Politics, Ideology, and Discourse", dalam Ruth Wodak (Ed.), *Elsevier Encyclopaedia of Language and Linguistics: Volume on Politics and Language* (hlm. 728-740). Elsevier. (Online), (<http://www.discourse.org>), diakses 21 Maret 2012.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Imelda Dwi Putri Nainggolan, Putri Alifiah Widyawan, Najhan Akbar, Lukas, Febrian K, Endang Sholihatin, 2023. "Analisis Framing Pemberitaan Puan Maharani terhadap Isu Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja Di Portal Berita Kompas.com dan detik.com pada Edisi Oktober 2020", dalam *Sabda Jurnal Sastra dan Bahasa*, Juni, Vol. 1 No. 2, 85-95.
- Imelda Dwi Putri Nainggolan, Putri Alifiah Widyawan, Najhan Akbar, Lukas, Febrian K, Endang Sholihatin, 2023. "Analisis Framing Pemberitaan Puan Maharani terhadap Isu Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja Di Portal Berita Kompas.com dan detik.com pada Edisi Oktober 2020", dalam *Sabda Jurnal Sastra dan Bahasa*, Juni, Vol. 1 No. 2, 85-95.
- Lintang Cahya Rahmat Kinasih, Ayla Daniyah Ramadhini, Thea Kirana Ismi' Aida, Gayatri Puspita Sari, Roro Retno Wulan, 2023. "Analisis Framing Puan Maharani Saat Pidato IPU di Media," *Suara.com dan Kumparan, PROMEDIA, PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI*, Volume Ke-9 No. 1, Juni 2023, Kinasih L.C.R., dkk. *Analisis Framing*, hal 117- hal 137.
- Mulyana, 2005. *Kajian Wacana Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Nadia Azkal Uyun, Khusnul Khotimah, 2023. "Fungsi Bahasa Dalam Wacana Lisan Pidato Puan Maharani Pada Acara Hari Bung Karno", *WIDYANTARA* Volume 1 Nomor 2, November 2023, 144-155.